

Penyebab Tingginya Angka Pengangguran di Jawa Barat

Yudho Ar Rihan Adipratomo^{1*}, Manuntun Parulian Hutagaol², Dahri Tanjung³

^{1,2}Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor

³Program Studi Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor

yudhoadipratomo@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 2 April 2024

Page: 158-165

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1274>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1274>

Article History:

Received: 03-04-2024

Revised: 10-04-2024

Accepted: 12-04-2024

Abstract : Unemployment is one of the main indicators of macroeconomics which is used to measure the efficacy of a region's economic development. From the period of 2017 to 2021, the open unemployment rate in West Java Province tends to increase every year. The highest increase occurred during the presence of Covid-19 pandemic in Indonesia at 2020. But on the other hand, West Java's Gross Regional Domestic Product which is an indicator to calculate the economic growth also tends to increase every year. The purpose of this study is to analyze the reasons of high unemployment rate in West Java Province and solutions to overcome it. Secondary data of 27 regency/municipality in West Java were analyzed quantitatively by panel data analysis and qualitatively by descriptive analysis. The result shows that the low rate of job creation, education index, house hold consumption, and the high growth of labour force causing the high rate of unemployment in West Java. As for the solutions to reduce open unemployment rate are increasing the government expenditure, escalating the compulsory education program to twelve years, and increasing negotiations as an effort for job creation.

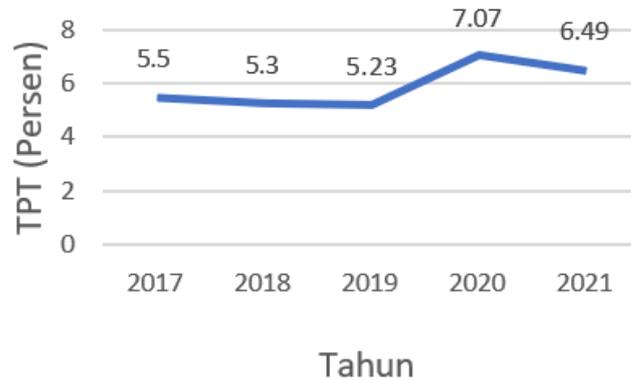
Keywords : Covid-19; Open Unemployment; Panel Data; Policy; West Java

Abstrak : Pengangguran merupakan salah satu indikator makroekonomi utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam periode 2017 hingga 2021, angka pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi saat hadirnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia. Namun di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat serta upaya dalam mengatasinya. Data yang digunakan adalah data sekunder 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang kemudian diolah dengan metode analisis berupa analisis kuantitatif data panel dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh rendahnya kesempatan kerja, tingkat pendidikan, konsumsi masyarakat, dan tingginya pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Barat. Solusi untuk mengurangi angka pengangguran antara lain peningkatan belanja daerah, eskalasi program wajib belajar menjadi dua belas tahun, serta peningkatan negosiasi dalam upaya penciptaan lapangan pekerjaan.

Kata Kunci : Covid-19; Data Panel; Jawa Barat; Pengangguran Terbuka; Kebijakan

PENDAHULUAN

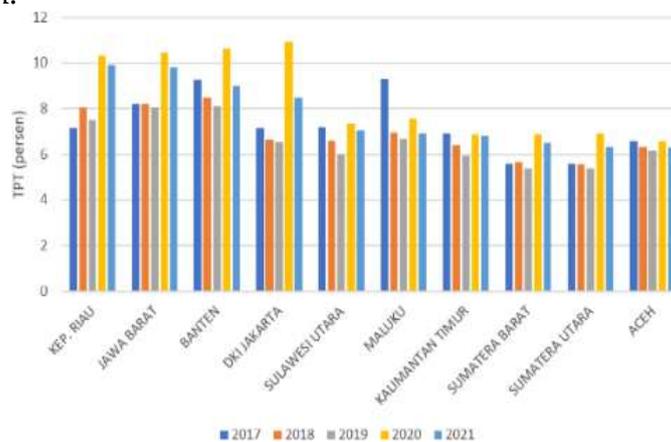
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2019) merumuskan empat pilar pembangunan guna mewujudkan Visi Indonesia 2045, diantaranya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan manusia serta penguasaan iptek, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dalam pilar pembangunan manusia dan penguasaan iptek, rakyat merupakan kunci dalam menyongsong pilar tersebut. Pada salah satu poin di pilar pertama, dicantumkan bahwa Indonesia akan menjaga tingkat pengangguran pada tingkat pengangguran alamiah, yaitu pada level tiga hingga empat persen atau yang dikenal dengan kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*).



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2022

Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia bergerak dengan tren yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, terdapat lonjakan persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang diakibatkan oleh keberadaan pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 Indonesia mulai mengalami pemulihan pada persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,58 persen dari tahun sebelumnya menjadi 6,49 persen angkatan kerja atau sejumlah 9,1 juta jiwa dari 140,15 juta jiwa penduduk angkatan kerja. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam periode 2017 hingga 2021 belum mampu mencapai tingkat pengangguran alamiah.



Gambar 2. Sepuluh Provinsi dengan TPT Terbesar di Indonesia Tahun 2017-2021 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2022

Berdasarkan proyeksi Sakernas, dapat diamati pada gambar 2 bahwa Jawa Barat konsisten menempati posisi tiga besar dalam hal persentase TPT dengan berada pada rentang 8,04-8,23 persen pada periode Agustus 2017-Agustus 2019. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 dimana TPT Jawa Barat mencapai 10,46 persen pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 2,42 persen apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sebesar 8,04 persen secara tahunan. Namun, secara kuantitas, dapat diamati provinsi penyuplai populasi pengangguran tertinggi di Indonesia adalah provinsi Jawa Barat. Dengan tingginya populasi di Jawa Barat, maka

pengentasan angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat penting untuk dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* yang digunakan merupakan data tahunan selama lima tahun, yaitu data tahun 2017-2021. Data *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Variabel ekonomi yang digunakan antara lain, angka pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), investasi, jumlah penduduk dan variabel *dummy* covid. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif melalui analisis regresi data panel. Pengolahan data dilakukan menggunakan *software Microsoft Excel* dan *Stata 14*. Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

$$TPT_{it} = \alpha + \beta_1 Growth_{it} + \beta_2 \ln IPM_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 Pop_{it} + \beta_5 Inv_{it} + \beta_6 D + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

- α : koefisien intersep
- \ln : logaritma natural
- $\beta_1 - \beta_5$: koefisien regresi variabel independen
- TPT : Tingkat Pengangguran terbuka (Persen)
- Growth* : Pertumbuhan ekonomi (Persen)
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia (Poin)
- UMK : Pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (Persen)
- Pop : Pertumbuhan jumlah penduduk (Persen)
- Inv : *Share* investasi terhadap PDRB (Persen)
- D : Variabel *dummy* untuk periode pandemi Covid-19
D=0, jika pandemic Covid-19 belum terjadi
D=1, jika pandemi Covid-19 terjadi
- ε : Koefisien galat
- i : Data kerat lintang 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
- t : Data deret waktu tahun 2017-2021

Estimasi model yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji tiga metode, yaitu metode *common effect*, metode *fixed effect*, dan metode *random effect*. Analisis ini dilakukan untuk menentukan determinan angka pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat dan penentuan model terbaik dilakukan menggunakan uji Chow dan uji Hausman.

Model *common effect* atau *pooled least square* dilakukan dengan cara menggabungkan data *cross section* dan data *time series* serta mengestimasi dengan menggunakan metode OLS. Metode ini mengasumsikan bahwa *intercept* dan *slope*, baik perilaku data antar dimensi individu maupun antar waktu adalah sama. Adanya perbedaan *intercept* dan *slope* diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan (*error term*).

Model *fixed effect* merupakan model dengan *intersep* berbeda untuk setiap subjek (*cross section*) namun *slope* setiap subjek tidak akan berubah setiap waktu. Model ini muncul ketika efek individu dan peubah penjelas tidak memiliki pola yang acak (Firdaus, 2020). Selain itu, model ini dapat digunakan sebagai alat estimasi data panel dengan menambah variabel baru yaitu variabel *dummy* yang dapat menjadi model sesuai dengan definisi dan kriteria masing-masing asumsi.

Model *random effect* mengestimasi data panel yang variabel *residual* diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan pada model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*. Metode analisis data panel dengan menggunakan model *random effect* memiliki syarat, yaitu jumlah *cross section* harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Pada tahun 2017, realisasi TPT di Jawa Barat mencapai 8,22 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan kisaran 6,5-7 persen. Pada tahun 2018, Jawa Barat mengalami peningkatan TPT secara yoy sebesar 0,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan kembali gagal dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan pada kisaran 6,5-6 persen. Target persentase TPT yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu 7,9-8 persen dan Jawa Barat kembali gagal dalam memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023. Namun, meskipun gagal dalam memenuhi target awal, Jawa Barat mampu menurunkan TPT nya menjadi 8,04 persen atau 0,19 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018.

Timbulnya guncangan akibat pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevisi RPJMD 2018-2023 ke arah yang pesimistis, Meskipun demikian, penyesuaian ulang target RPJMD 2018-2023 berhasil direalisasikan oleh Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan dengan TPT 2020 sebesar 10,46 persen atau 0,12 persen dari target RPJMD. Meskipun demikian, masyarakat mengalami pukulan keras akibat peningkatan pengangguran sebesar 2,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Lalu, pada tahun 2021, persentase TPT berada pada level 9,82 persen atau mengalami perbaikan sebesar 0,64 persen dibandingkan dengan tahun 2020 dan memiliki hasil lebih baik dari target RPJMD yang telah direvisi yaitu 10,45 persen.

Pemilihan Model Terbaik

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari taraf nyata α (0,05) yang berarti tolak H_0 , sehingga model *fixed effect* lebih baik dari model *common effect*. Hasil uji Hausman pada tabel 1 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,9795 atau lebih besar dari taraf nyata α (0,05) yang berarti terima H_0 , sehingga model *random effect* lebih baik dari model *fixed effect*. Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari kedua uji tersebut diperoleh bahwa model *random effect* adalah model terbaik.

Tabel 1. Hasil Uji F dan Hausman

Jenis Uji	Nilai Probabilitas	Keputusan
Uji Chow	0,0000	Tolak H_0 , FEM
Uji Hausman	0,9795	Terima H_0 , REM

Sumber: Hasil olahan Stata14

Hasil estimasi dari uji t-statistik pada tabel 2 digunakan untuk menjelaskan apakah terdapat pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan terdapat dua variabel dengan nilai lebih kecil dari taraf nyata α (0,01) yaitu variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM, satu variabel dengan nilai lebih kecil dari taraf nyata α (0,1) yaitu variabel pertumbuhan jumlah penduduk, dan tiga variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan dalam model, yaitu variabel pertumbuhan UMK, *share* investasi, dan covid (*dummy*).

Tabel 2. Hasil Estimasi Penduga Tingkat Pengangguran Terbuka

Variabel	Koefisien	Prob.
C	0,913	0,012
GROWTH	-0,152	0,004*
LnIPM	-1,356	0,009*
UMK	0,065	0,175
INV	0,010	0,139
POP	0,088	0,058***
COVID	0,066	0,909
R-squared		0,6778
Prob(F-statistic)		0,0000

Keterangan: *) Signifikan pada taraff nyata 1% **) Signifikan pada taraff nyata 5%

***) Signifikan pada taraff nyata 10%

Sumber: Hasil olahan Stata14

Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap TPT. Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi (GROWTH) naik sebesar satu

persen, maka TPT di Jawa Barat akan turun sebesar 0,152 persen dengan asumsi ceteris paribus dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rasyida (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi baik pada jangka pendek maupun jangka panjang memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Hasil ini dapat terjadi akibat dari kebijakan yang sedang digencarkan oleh pemerintah mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam studi yang dilakukan oleh Devanty et al. (2018), ditemukan adanya pengaruh signifikan antara regulasi TKDN terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri pada sektor TIK di Indonesia yang dibuktikan dengan tren peningkatan jumlah penjualan dan kapasitas produk telepon seluler 4G LTE, peningkatan jumlah tenaga kerja domestik dalam proses produksi di dalam negeri dan peningkatan teknisi domestik dalam proses *research and development* serta *engineer* domestik dalam proses pembuatan aplikasi di dalam negeri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Winardi et al. (2017), Jawa Barat memiliki fokus yang tinggi terhadap industri yang padat modal dan cenderung mengembangkan sektor industri logam dasar dan barang jadi dari logam serta alat angkut lainnya yang memiliki efek pengganda rendah. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya stimulasi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dari sektor industri. Hal ini ditunjukkan dengan Jawa Barat yang memiliki PDRB tinggi namun memiliki pertumbuhan ekonomi rendah.

Variabel IPM dalam penelitian ini memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap TPT. Artinya, apabila IPM ($\ln IPM$) naik sebesar satu persen, maka TPT di Jawa Barat akan turun sebesar 1,356 persen dengan asumsi ceteris paribus dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan temuan Mahroji dan Nurkhasanah (2019) yang menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT.

Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas yang dapat terjadi melalui peningkatan pada modal manusia. Dalam teori pertumbuhan baru peningkatan pada modal manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan produktivitas sehingga permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat dan berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran.

Namun, meskipun IPM konsisten mengalami pertumbuhan positif, jumlah angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Apabila mengamati komponen penyusunnya maka dapat diperoleh bahwa setiap pertumbuhan variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami perlambatan maka IPM di Jawa Barat akan mengalami perlambatan pula, kecuali pada tahun 2021. Perlambatan pertumbuhan RLS berdampak pada IPM yang mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga TPT mengalami peningkatan.

Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota pada penelitian ini ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT di Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil estimasi nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik t Upah Minimum Kabupaten/Kota ($\ln UMK$) sebesar 0,175 atau di atas taraf nyata α (0,1). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Trimurti dan Komalasari (2014) yang menemukan tidak adanya hubungan signifikan antara upah minimum dengan TPT. Hal ini terjadi karena kenaikan upah minimum tiap tahunnya selalu mampu diprediksi oleh perusahaan. Kenaikan upah minimum yang terjadi juga didasari oleh hasil kesepakatan antara pemerintah, perwakilan serikat buruh, dan perwakilan perusahaan. Sehingga, hal ini menyebabkan tidak berpengaruhnya upah minimum terhadap TPT di Jawa Barat pada periode 2017 hingga 2021.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh terhadap TPT di Jawa Barat. Artinya, temuan ini bertentangan dengan model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar yang menyatakan peningkatan investasi kapital akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi akibat asumsi yang digunakan dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar adalah kondisi *full employment* yang tidak relevan dengan kondisi tenaga kerja di Jawa Barat dalam periode 2017 hingga 2021. Selain itu, model tersebut juga menggunakan asumsi *closed economy*. Asumsi ini tidak terpenuhi akibat sistem ekonomi yang diterapkan di Jawa Barat merupakan ekonomi terbuka, di mana arus investasi tidak hanya berasal dari dalam negeri.

Di sisi lain, terdapat ketimpangan realisasi investasi yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat tahun 2018-2023 dimana investasi cenderung berpusat di wilayah pengembangan Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi), Purwasuka (Purwakarta, Subang, dan Karawang), dan Cekungan Bandung. Oleh karena itu, temuan ini sejalan dengan penelitian Yanti et al. (2019) yang menemukan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT di Sulawesi. Hal ini diakibatkan adanya kesenjangan realisasi investasi antar daerah. Kesenjangan ini mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tinggi hanya dapat terjadi pada segelintir wilayah.

Variabel pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap TPT. Artinya, apabila jumlah penduduk naik sebesar satu persen, maka TPT di Jawa Barat akan meningkat sebesar 0,088 persen dengan asumsi ceteris paribus dan sebaliknya. Penelitian ini sejalan dengan temuan Permadi dan Chrystanto (2021) yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Hal ini terjadi akibat pertumbuhan jumlah penduduk dengan peningkatan angkatan kerja yang tinggi pada wilayah tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, penelitian ini juga mendukung temuan Sudjarwadi (2014), yang menemukan tidak berlakunya kurva Phillips di Indonesia karena inflasi cenderung disebabkan oleh kenaikan harga seperti BBM, bukan melalui permintaan agregat. Sehingga, permintaan terhadap barang dan jasa tidak serta merta meningkat melalui pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk khususnya angkatan kerja berimplikasi pada peningkatan pengangguran di Jawa Barat.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel *dummy* covid-19 yang ada pada tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT di Jawa Barat. Hasil ini berkemungkinan terjadi akibat periode covid-19 yang baru berjalan dua tahun dengan dampak yang berbeda di tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditunjukkan dengan Sani SR et al. (2022) yang menemukan bahwa Covid-19 memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan periode 2018 hingga 2020. Namun, Auliya dan Aguslim (2022) menemukan bahwa variabel *dummy* Covid-19 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan rentang waktu 2010 hingga 2021 di Indonesia.

Tabel 3. Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
2017	8,22%
2018	8,23%
2019	8,04%
2020	10,46%
2021	9,82%

Sumber: BPS (2022)

Dapat diamati pada tabel 3 bahwa tingkat pengangguran terbuka telah mengalami peningkatan sejak sebelum adanya pandemi. Kemudian pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 2,06 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,64 persen. Hal ini dapat menjelaskan bahwa fenomena pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap angka pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengangguran merupakan masalah pembangunan utama di Jawa Barat. Variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap TPT di Jawa Barat. Sedangkan variabel pertumbuhan jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap angka pengangguran terbuka. Penyebab tingginya angka pengangguran di Jawa Barat antara lain masih belum maksimalnya pertumbuhan ekonomi

dalam mengakselerasi pertumbuhan kesempatan kerja, masih rendahnya indeks pendidikan dan konsumsi per kapita, serta tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat.

B. Saran

Dengan pembahasan yang telah dipaparkan, maka upaya pengentasan angka pengangguran terbuka di Jawa Barat wajib menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi tingginya angka pengangguran antara lain 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memfokuskan investasi dan belanja daerah untuk mengembangkan sektor dengan efek pengganda yang tinggi. 2) Mengeskalasi visi wajib belajar menjadi dua belas tahun untuk menunjang IPM melalui RLS. 3) Meningkatkan negosiasi antara pemerintah dengan investor maupun pihak lain dalam mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. 2021. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Bandung (ID): Bappeda Jawa Barat.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Visi Indonesia 2045. Jakarta (ID): Bappenas.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2022. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Poin). Bandung (ID): BPS Jawa Barat.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2022. Jawa Barat Dalam Angka 2017- 2021. Bandung (ID): BPS Jawa Barat.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2022. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Poin). Bandung (ID): BPS Jawa Barat.
- Devanty A, Hamzah MZ, Sofilda E. 2018. Analisis Dampak Regulasi Tingkat Kompetensi Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Industri Pada Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Seminar Nasional Cendekiawan. 4(2): 823-830.
- [Disdukcapil]. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. 2022. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Jawa Barat. Bandung (ID): Disdukcapil Jawa Barat.
- [Disnakertrans]. Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi Jawa Barat. 2022. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2021. 2022. Bandung (ID): Disnakertrans Jawa Barat.
- [DPMFTSP]. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2021. A Portfolio of West Java's Opportunities in Investment, Trade, and Partnership. Bandung (ID): Pemerintah Provinsi Jawa barat.
- Firdaus M. 2020. Aplikasi Ekonometrika dengan E-views, Stata dan R. Bogor (ID): IPB Press.
- Gough I. 1972. Marx's Theory of Productivity and Unproductive Labour. *New left review*. 1/76: 47-72.
- Hamzah RA. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2020. *Welfare*, 2(2), 133-147. doi: 10.37058/wlfr.v2i2.3700
- Mahroji D, Nurkhasanah I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 51-72. doi: 10.35448/jequ.v9i1.5436
- Mankiw NG. 2016. *Macroeconomics*. New York (US): Worth Publishers. Edisi Kesembilan. [OECD] Organization of Economic Co-operation and Development. Unemployment Rate (indicator). Paris (FR): OECD.
- Permadi EE, Chrystanto. 2021. Analisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018. *OECOMICUS Journal of Economics*, 5(2): 86-95. doi: 10.15642/oje.2021.5.2.86- 95.

- Pratomo AM. 2019. Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Industri terhadap Pengangguran di Jawa Barat. Program Studi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Negeri Semarang. 1-51
- Priyarsono DS, Sahara, Firdaus M. 2007. Materi Pokok Ekonomi Regional. Jakarta (ID): Universitas Terbuka. Edisi Pertama.
- Sudjarwadi H. 2015. Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi dan Pengangguran (Kurva Phillips) di Indonesia. Jakarta (ID): Biro Anggaran dan Pelaksanaan APBN.
- Tangke RP, Juliansyah, & Lestari D. 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan Serta Upah Terhadap Pengangguran di Kabupaten Paser. *Kinerja*, 16(1), 69-77. doi: 10.30872/jkin.v16i1.5284.
- Todaro MP, Smith SC. 2020. *Economic Development*. London (GB): Pearson. Edisi Ketiga belas.
- Trimurti CP, Komalasari Y. 2014. Determinants of Unemployment: Empirical Evidences from 7 Province in Indonesia. *Scientific Research Journal*. 2(4): 5-9.
- [WHO] World Health Organization. 2020. *Covid-19 Strategy Update*. Geneva (CH): WHO.
- Winardi, Priyarsono DS, Siregar H, Kustanto H. 2017. Kinerja Sektor Industri Manufaktur Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Lokasi di Dalam dan Luar Kawasan Industri. *Jurnal Manajemen Teknologi*. 16(3):241-257.
- Yanti NH, Anam H, Adda HW. 2017. Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi. *E Jurnal Katalogis*. 5(4) : 138- 149.